

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR : TANTANGAN DAN SOLUSI**

Fikriatunnisa<sup>1</sup>, Marchenda Amalia Hapsari<sup>2</sup>, Zannuba Chofshof Yusman<sup>3</sup>, Septi Fitri Meilana<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

<sup>1</sup>[sekumfikria@gmail.com](mailto:sekumfikria@gmail.com),

<sup>2</sup>[marchendaamaliahapsari@gmail.com](mailto:marchendaamaliahapsari@gmail.com), <sup>3</sup>[zchofshof@gmail.com](mailto:zchofshof@gmail.com),

<sup>4</sup>[septi.fitri.meilana@uhamka.ac.id](mailto:septi.fitri.meilana@uhamka.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the inclusive education policy in elementary schools, especially at SDN Dukuh 08. This study uses a case study paradigm and a qualitative methodology. Selection of subjects is predicated on consideration, namely one of the teachers in whose class there are children with special needs (ABK). Data is gathered by means of documentation, interviews, and observation. The results showed that: (1) The implementation of inclusive policies for children with special needs (ABK) includes teacher training, curriculum adaptation, and collaboration with the government, (2) The challenges are the shortage of special educators, lack of facilities and infrastructure, parental resistance, and lack of teacher understanding, (3) The positive impact is that teachers are more patient and creative, and regular students are inclusive of children with special needs (ABK).*

**Keywords:** *special mentor teachers, education policy, inclusive education*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar khususnya di SDN Dukuh 08. Pemilihan subjek untuk penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dan model studi kasus digunakan yaitu salah satu guru yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan kebijakan yang memungkinkan semua anak berkebutuhan khusus (ABK) berpartisipasi ada pelatihan guru, adaptasi kurikulum, dan kolaborasi dengan pemerintah, (2) Tantangannya yaitu kekurangan tenaga pendidik khusus, kurangnya sarana dan prasarana, resistensi orang tua, dan minimnya pemahaman guru, (3) Dampak positif berupa guru lebih sabar dan kreatif, serta peserta didik reguler bersikap inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).

**Kata Kunci:** guru pembimbing khusus, kebijakan pendidikan, pendidikan inklusif

## **A. Pendahuluan**

UNESCO mengembangkan istilah "pendidikan inklusif", yang berarti "pendidikan untuk semua", yang berarti "pendidikan yang ramah untuk semua", dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali (Bahri, 2022). Karakteristik fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi individu tidak membedakan hak dan kesempatan tersebut. Selain itu, inklusi berlaku untuk semua anak, bukan hanya untuk anak-anak yang unik atau luar biasa. Oleh karena itu, pendidikan inklusif berarti sistem layanan pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat seperti siswa seusia mereka. Sekolah ini menawarkan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Selain itu, guru dapat menerima bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu anak-anak mereka berhasil. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak adalah inti dari pendidikan inklusif yang bertujuan untuk mendapatkan

pendidikan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa diskriminasi (Nenden Ineu Herawati, 2005).

Semua warga negara Republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program pendidikan inklusi telah dimulai, yang berfokus pada pelayanan kepada anak. Semua anak, bukan hanya mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat dimasukkan ke dalam program pendidikan inklusi. Ini disebabkan fakta bahwa setiap anak secara alami memiliki ciri-ciri unik, dan keberagaman yang unik, yang harus dibantu dalam semua jenjang pendidikan, terutama dalam pendidikan usia dini (Prifiantari et al., 2023). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 kemudian mengatur pendidikan inklusi (Warminda et al., 2022).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif dan menggunakan model pendekatan studi kasus.

Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si (2017:5) menyimpulkan bahwa studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara menyeluruh, mendalam tentang suatu program, peristiwa atau aktivitas, baik pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa tersebut (Hidayat, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 yang berlokasi di SDN Dukuh 08 yang berlokasi Jl. Penggilingan Baru I Kecamatan Kramat Jati. Jakarta Timur. Salah satu guru yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelasnya adalah subjek penelitian ini. Peneliti memulai penelitian dengan observasi dan kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan dokumentasi, wawancara, dan survei lanjutan. Penelitian kualitatif ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian, serta instrumen pendukung seperti observasi, wawancara, dan pedoman dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi**

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian pustaka menunjukkan bahwa sejumlah langkah telah diambil untuk menerapkan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar : (Nurhayati & , Langlang Handayani, 2020). (1) Pelatihan Guru yaitu dinas pendidikan atau pemerintah pusat memberikan pelatihan kepada guru tentang pendidikan inklusif. Namun, pelatihan ini seringkali tidak dilanjutkan dengan baik, (2) Adaptasi Kurikulum yaitu anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak memiliki kurikulum khusus. Namun, guru memberikan perhatian yang lebih besar pada anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama dalam hal ujian dan evaluasi pembelajaran, dan (3) Kolaborasi dengan Pemerintah yaitu Sekolah telah menyampaikan kebutuhan dinas pendidikan, termasuk kebutuhan tenaga pendidik khusus yang lebih besar.

#### **Tantangan**

Tantangan yang terdapat dalam (Kesti Anggreani et al., 2024), yaitu (1) Kekurangan Tenaga Pendidik, karena Banyak sekolah dasar tidak memiliki guru pembimbing khusus

(GPK), sehingga guru reguler bertanggung jawab terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) dan peserta didik normal, (2) Kurangnya Sarana dan Prasarana yaitu Sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti ruang terapi atau alat bantu belajar, (3) Resistensi Orang Tua yaitu Ada beberapa orang tua siswa reguler yang tidak nyaman dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas yang sama, karena dianggap dapat mengganggu fokus kelas, dan (4) Minimnya Pemahaman Guru yaitu meskipun diberi pelatihan, guru seringkali tidak percaya diri dalam menerapkan metode pengajaran yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

### **Dampak Positif**

Dalam menangani peserta didik dengan berbagai kebutuhan, guru menjadi lebih sabar dan kreatif dan peserta didik reguler lebih menyadari keberagaman dan cenderung bersikap inklusif terhadap teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus.

Sesuai dengan landasan yuridis seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009, Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa, termasuk individu dengan kebutuhan khusus dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Studi ini menyelidiki penerapan kebijakan inklusif di sekolah dasar. Fokus penelitian ini adalah masalah yang dihadapi, seperti kekurangan guru khusus, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan guru harus didukung dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) harus tersedia. Selain itu, untuk membuat lingkungan pendidikan yang inklusif, sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama ("PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA," 2009).

Tujuan kebijakan pendidikan inklusif adalah untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Kebijakan ini sejalan dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009, yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif di Indonesia.

Pendidikan inklusi adalah kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan diberikan kepada setiap siswa dengan cara yang sama, terlepas dari kebutuhan mereka. Ini memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang normal di masa depan menerima pendidikan yang ketat dan berkualitas tinggi (Alfikri et al., 2022).

Meskipun kebijakan ini telah diterapkan di beberapa sekolah, ada beberapa masalah yang membuatnya sulit untuk diterapkan. Untuk mampu mengajar anak berkebutuhan khusus (ABK), guru harus tahu bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Keterlibatan guru dapat didefinisikan sebagai kemampuan mereka dalam mengajar dan mengelola siswa mereka di kelas. Hasil wawancara dengan guru bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam menangani ABK tanpa bantuan pendamping menunjukkan bahwa kekurangan tenaga pendidik khusus adalah masalah utama. Selain itu, sarana dan prasarana untuk pendidikan anak dengan kebutuhan khusus yang menjadi suatu masalah. Fasilitas yang diperlukan, seperti alat bantu belajar dan ruang terapi sangat terbatas.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus membantu dengan menyediakan guru pendamping khusus dan meningkatkan fasilitas sekolah. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi guru harus mencakup pendekatan yang lebih praktis untuk membantu guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan cara yang lebih efektif. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusif. Keterlibatan masyarakat seperti yayasan atau lembaga swasta yang membantu anak berkebutuhan khusus (ABK) melalui terapi atau pelatihan keterampilan hidup adalah contoh nyata. Penyadaran publik, termasuk orang tua peserta didik reguler untuk menerima pendidikan inklusif sebagai bagian dari membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan adalah strategi tambahan.

Program SDN Dukuh 08 mendukung kebijakan pendidikan inklusif, termasuk program penerimaan siswa berkebutuhan khusus dan asesmen. Dengan melakukan ini, SDN Dukuh telah mencapai pemenuhan komponen tersebut. SDN Dukuh 08

menyediakan kuota khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk menjadi siswa atau mendaftar di sekolah tersebut. Kuota ini, bagaimanapun, hanya dapat digunakan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan klasifikasi ringan yang dapat didaftarkan dan hanya satu anak per kelas. Dengan demikian, program penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus ini berfokus pada komponen input peserta didik. Dalam hal program asesmen peserta didik, komponen input peserta didik memiliki kebutuhan khusus SDN Dukuh 08 juga mengadakan program asesmen untuk mengidentifikasi anak dengan kebutuhan khusus yang akan atau sudah menjadi siswa di SDN Dukuh 08. Program ini dilaksanakan melalui pelaksanaan tes psikologi atau tes khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang telah mendaftar di SDN Dukuh 08 atau yang telah bersekolah di SDN Dukuh 08 tetapi mengalami kesulitan akademik tertentu. Selain itu SDN Dukuh 08 juga mengevaluasi anak berkebutuhan khusus (ABK) sesuai dengan kemampuan mereka. Guru akan memberikan ujian atau tes yang berbeda dengan ujian anak biasa.

Jika dibandingkan anak biasa yang bergabung dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam satu kelas, guru menetapkan tingkat kelulusan minimal yang lebih rendah (Utari, 2020).

Implementasi kebijakan sekolah inklusi di tingkat pendidikan dasar perlu ditinjau secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif telah berjalan dengan baik serta telah memenuhi kebutuhan dan tujuan. Aktivitas ini merupakan bagian penting dari proses kebijakan publik, yang berfungsi untuk menentukan sejauh mana kebijakan tersebut berhubungan dengan kepentingan para pemangku kepentingan dan diterima oleh masyarakat.

Untuk mencapai pendidikan inklusi yang ideal, diperlukan sinergi antara pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan yang cermat, pengorganisasian yang efektif, arahan yang jelas, dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk proses ini dari dinas pendidikan, kepala sekolah, serta masyarakat. Peran kepala sekolah sangat krusial dalam menetapkan visi dan misi sekolah. Selain itu, komunikasi yang efektif antara kepala

sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan pendidikan inklusi. kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tersedianya sarana prasarana yang memadai menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program inklusi.

Keterlibatan SDM yang berkualitas, dukungan masyarakat, serta kerja sama dengan pemerintah juga sangat penting untuk mewujudkan pendidikan inklusi sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 (Ikramullah & Sirojuddin, 2023). Sebagaimana dapat ditegaskan, selama tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan cermat, jika pada saat implementasi tidak dilakukan upaya optimalisasi, maka akan sulit untuk memahami hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan. Akhirnya, saat tiba di tahap evaluasi, sering kali ditemukan bahwa tidak ada korelasi antara pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan kebijakan tidak sesuai dengan harapan, bahkan bisa menjadi penghalang bagi para pembuat kebijakan itu sendiri (Sholihah & Chrysoekamto, 2021).

#### **D. Kesimpulan**

Tujuan dari Permendiknas No. 70 Tahun 2009 adalah untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memiliki akses yang sama ke pendidikan. Misalnya, SDN Dukuh 08 telah menerapkan evaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan anak, penerimaan peserta didik ABK dengan kuota terbatas, dan asesmen psikologis untuk deteksi dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada upaya untuk melatih guru dan mengadaptasi kurikulum, ada beberapa masalah dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tidak ada guru pembimbing khusus, tidak ada fasilitas pendidikan seperti ruang terapi dan alat bantu belajar, dan beberapa orang tua peserta didik reguler menentang. Sebaliknya, guru akan lebih sabar dan kreatif dan peserta didik reguler akan lebih menyadari inklusi sebagai hasil dari kebijakan ini.

Sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama agar kebijakan pendidikan inklusi berhasil. Sangat penting untuk mendapatkan dukungan yang berkelanjutan bagi guru, fasilitas yang memadai, dan

peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung ABK melalui terapi atau pelatihan keterampilan. Studi ini menegaskan untuk memastikan bahwa pendidikan inklusi mencapai tujuan, penerapan kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang berkelanjutan. Meskipun masih ada ruang untuk diperbaiki, penelitian ini memberikan fondasi penting untuk memahami pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, peneliti berikutnya harus memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan daerah. Penelitian mendalam tentang seberapa efektif pelatihan guru dan bagaimana hal itu berdampak pada kualitas pengajaran ABK juga dapat menjadi fokus yang relevan.

Memperkuat infrastruktur pendidikan inklusif harus menjadi prioritas utama pemerintah di masa mendatang. menyediakan fasilitas pendukung yang memadai dan menambah jumlah guru pembimbing khusus, terutama orang tua siswa, untuk meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap pendidikan

inklusif. Sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil akan didukung oleh tindakan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 1–12.
- Bahri, S. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(6), 94–100.  
<https://doi.org/10.58578/artzusin.v2i6.703>
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan. *Jurnal Study Kasus, August*, 128.
- Ikramullah, & Sirojuddin, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *JURNALBASICEDU*, 6(4), 613–621.  
<https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i4.384>
- Kesti Anggreani, Nur Ahsana Tafsira, Trisna Febriyani, & Elsha Syafitri. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar: Tantangan Dan Strategi Efektif. *Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 1(2), 199–204.  
<https://doi.org/10.62383/katalis.v1i2.355>
- Nenden Ineu Herawati. (2005). PENDIDIKAN INKLUSIF. *PANDUAN KONSELING BEHAVIORAL DENGAN TEKNIK*

- SELF MANAGEMENT UNTUK MENINGKATKAN KERJA KERAS SISWA Pengantar*, 2, 1–7.
- Nurhayati, H., & , Langlang Handayani, N. W. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3(2), 524–532. <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/971>
- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. (2009). *Экономика Региона*, 19(19), 19.
- Prifiantari, S., Hendri Mulyana, E., & Qonita. (2023). *The importance of an accurate understanding of numerical magnitudes*. 7(2580–9806), : 080-087.
- Sholihah, A., & Chrysoekamto, R. (2021). Penerapan Manajemen Pengembangan Minat dan Bakat untuk Meningkatkan Potensi Siswa di Madrasah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i2.36>
- Utari, D. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar juara kota yogyakarta implementation of inclusive education policy in the basic school juara Yogyakarta city. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2s), 175–188.
- Warminda, Y., Hasrul, H., & Haryani, M. (2022). Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK dan/atau Memiliki Bakat Istimewa Di SMPN Kota Padang. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 9989–10003. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4047>